

BAB II

SISTEM PEMERINTAH DAN POLITIK PRANCIS

Dalam bab II ini akan menjelaskan mengenai sistem pemerintah dan politik di Prancis. Dengan sistematika yaitu, sistem pemerintah Prancis, Politik Luar Negeri Prancis dan Hubungan Prancis dan Mali. Dimana dalam sistem ini kita bisa melihat bagaimana suatu kebijakan diambil dalam suatu pemerintahan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri khususnya Prancis.

A. Sistem Pemerintah Prancis

Sebelum membahas mengenai pengaruh dari citra dan nilai Presiden Francois Hollande atas keberpihakan Prancis terhadap konflik di Mali, penulis akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Prancis sebelumnya yang bertujuan lebih memahami bagaimana seorang Presiden dalam sistem pemerintahan Prancis memiliki pengaruh yang besar dalam setiap pengambilan keputusan.

Pertama-tama negara Prancis merupakan sebuah negara di benua Eropa. Di mana letak dari negara Prancis itu sendiri berbatasan dengan Jerman, Swiss, Itali di sebelah Barat, Selat Inggris dan Belgia di sebelah Utara, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Mediterania dan Spanyol. Seperti gambar di bawah peta negara Prancis.



Gambar 2.1: Peta negara Perancis

Sumber: Google Maps

([https://www.google.com/maps/place/Prancis/@45.8665231,-](https://www.google.com/maps/place/Prancis/@45.8665231,-6.9240942,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd54a02933785731:0x6bfd3f96c747d9f7!8m2!3d46.227638!4d21.13749)

[6.9240942,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd54a02933785731:0x6bfd3f96c747d9f7!8m2!3d46.227638!4d21.13749](https://www.google.com/maps/place/Prancis/@45.8665231,-6.9240942,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd54a02933785731:0x6bfd3f96c747d9f7!8m2!3d46.227638!4d21.13749)) di akses tanggal 30 Des 2018, 21:16.

Prancis sendiri adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Untuk menjalankan pemerintahannya Prancis menggunakan sistem pemerintahan Semi-Presidensial. Dimana sistem pemerintahan ini adalah di mana Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi di bantu oleh menteri di mana perdana menteri itu sendiri di pilih oleh presiden. Sistem pemerintahan semi presidensial dari Prancis itu sendiri sedikit dengan sistem semi presidensial negara-negara pada umumnya, pada umumnya sistem pemerintahan semi presidensial kepala negara akan di pimpin oleh Presiden dan Kepala Pemerintahan di pimpin oleh menteri tetapi kekuasaan Presiden tidak ada batasan dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan di

negara nya. Pemilihan presiden sendiri di lakukan secara langsung oleh rakyat nya sendiri, akan tetapi menteri di pilih oleh Presiden. Bentuk pemerintahan Prancis sendiri adalah Republik Parlementer di mana Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan perdana menteri berada di bawah kekuasaan presiden.

Sistem pemilihan Prancis pada umumnya menggunakan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat nya dengan *Sistem Pluralitas Mayoritas* di mana di berlakukan *Two Round Ssystem* (TWS). Pengertian dari sistem Pluralitas Mayoritas itu sendiri adalah Pemilu akan terjadi hingga putaran kedua untuk mendapatkan kelebihan suara antara dua belah pihak, di mana rumus yang di gunakan adalah $50\%+1$.

Sistem pemilihan umum di Prancis terbagi menjadi empat jenis pemilihan umum yang di bedakan berdasarkan tingkatan jabatan. Pertama ada pemilihan *Election Municipales* di mana pemilihan ini di peruntukan untuk memilih walikota dan Commune atau sering di sebut *le maire* dan *conseiller municipaux* pemilihan atas walikota dan commune ini adalah pemilihan secara langsung dengan tingkatan paling mendasar dalam tatanan pemerintahan Prancis. Kedua ada *Election Regionales* pemilihan ini di peruntukan untuk seorang pemimpin tingkatan Provinsi atau sering kita sebut sebagai seorang gubernur dengan bahasa Prancis nya adalah *les conseilles regionaux* dengan masa jabatan selama 6 tahun. Ketiga ada pemilihan *Election Legislatives* untuk memilih *Le Deputes* atau anggota legislatif di Prancis, dan ada *Election Presidentielles* yaitu untuk pemilihan presiden. Masa jabatan dari anggota legislatif dan presiden ini hanya berlangsung selama 5 tahun.

Dalam melakukan pemilihan secara umum tentu saja di butuhkan sebuah partai di mana di Prancis sendiri menggunakan sistem multi partai. Sistem multi

partai ini bisa di artikan di mana partai yang mengikuti pemilihan umum lebih dari dua partai yang memiliki ideologi pemahaman yang berbeda-beda. Walaupun pada nyatanya multi parta yang di anut oleh Prancis di bagi menjadi dua belah kubu yaitu kubu partai Kiri dan Kubu Partai Kanan. Kubu Partai Kiri atau lebih sering di sebut *Gauche* di mana partai-partai ini kebanyakan menganut sistem ideologi Sosialisme, Demokrasi Sosial, Komunisme. Untuk Kubu Partai Kanan atau *Draut* lebih banyak menganut sistem Konservatisme, Liberal Klasik, dan Kelompok Agama. Partai-partai di Prancis sebagai berikut *Centrist Alliance, New Centre, Left Front, Movement for France, Radical Party, Europe Ecology the Greens, French Communist Party, National Front, Radical Party of the Left, Left Party, The Republicans, Democratic Movement, Together, Socialist Party, dan Communist Party* (Knapp & Wright, 2006). Dengan adanya sistem multi partai ini Prancis mengharapkan supaya tidak adanya dominasi atas sebuah partai tunggal di Prancis.

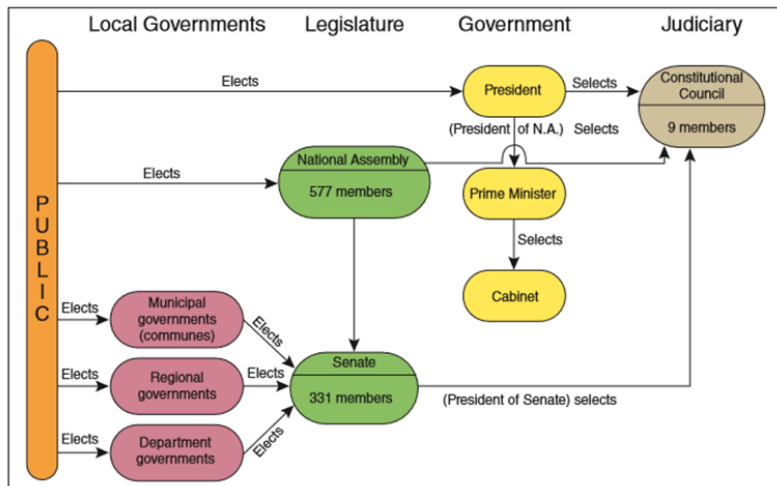
Untuk lembaga pemerintahan pusat terbagi menjadi tiga yaitu lembaga pemerintahan Legislatif, lembaga pemerintahan yudikatif, dan lembaga pemerintahan eksekutif. Tetapi lembaga yang di pilih secara langsung dengan mnggunakan PEMILU adalah lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dalam lembaga legislatif sendiri Prancis menggunakan sistem parlemen dua pintu atau lebih di kenal dengan Bikameral, Bikameral sendiri adalah dimana dalam tatanan legislatif terbagi menjadi dua lembaga lagi yang memiliki fungsi dan tugas berbeda satu sama lain. Di Prancis terbagi menjadi dua kamar yaitu *National Assembly* (Sidang Nasional) dan *Perliament Sovereignty* (Senat Tidak Berpendapat). Tugas umum dari dua lembaga legislatif tersebut adalah mengawasi referendum yang berjalan serta mengkaji segala

kebijakan yang akan di jalankan dalam badan pemerintah. Dari dua kamar badan legislative ini ada perbedaan satu sama lain. Pertama Senat sendiri di pilih oleh *Electorall College* atau disebut Dewan Lokal yang di mewakili daerah-daerah atau kota di Prancis di mana Dewan Lokal ini terdiri dari Wakil Municipal. Pada awalnya masa jabatan dari senat sendiri itu selama sembilan tahun akan tetapi pada tahun 2004 berubah menjadi 6 tahun saja. Sebenarnya kekuatan senat sendiri tidak sekuat dengan *National Assembly* karena pada dasarnya Senat di pilih oleh sebuah dewan untuk mewakili daerah-daerah yang terbilang cukup kecil. Berbeda dengan *National Assembly* pada dasarnya dipilih oleh rakyat.

Jumlah antara Senat dan *National Assembly* juga tidak sama dan memiliki perbedaan. Jumlah Senat pada pada awalnya adalah 321 Senat, akan tetapi pada tahun 2010 jumlah Senat di tambah menjadi 346 Senat hal ini di lakukan adanya perubahan demografis di Prancis. Jumlah dari *National Assembly* sendiri berjumlah 577 deputi untuk masa jabatan yang lebih sedikit daripada Senat yaitu hanya 5 tahun lamanya.

Sebenarnya tugas dari dua badan legislative ini tidak berbeda jauh tetapi yang membedakan sekali adalah kekuatan pendapat dari dua badan legislatif ini. *National Assembly* memiliki kuasa yang cukup kuat di bandingkan Senat, pertama *National Assembly* dapat membubarkan kabinet, meminta pertanggung jawaban terhadap perdana menteri dan kabinet serta bisa menjatuhkan mosi mutlak. Tetapi kelemahan dari *National Assembly* sendiri bisa di bubarkan oleh Presiden tetapi tidak bisa memecat Presiden, pembubaran yang di lakukan juga hanya bisa terjadi satu kali dalam satu tahun tidak boleh lebih. Apabila dalam suatu perumusan perundang-undangan, kebijakan, dan keputusan lainnya yang melibatkan

antara Senat dan *National Assembly* di Prancis tidak menyetujui nya maka bisa saja keputusan akhir tetapi memihak *National Assembly*. Hal tersebut sebenarnya jarang terjadi biasanya badan legislatif setuju secara bulat untuk meloloskan atau menolak sesuatu keputusan (RI, 2015).



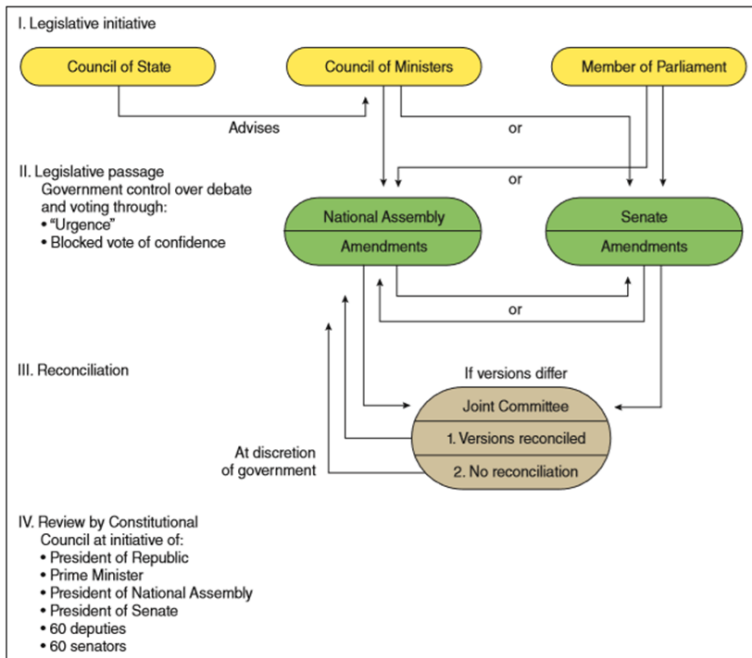
Gambar 2.2: Pemilihan Umum di Prancis

Pemilu sendiri di Prancis dipimpin oleh seorang Dewan Konstitusi di mana tugas dari Dewan Konstitusi ini adalah salah satunya bersagkutan dengan PEMILU. Dewan Konstitusi sendiri di pilih secara langsung oleh Presiden, Senat, dan *National Assembly*. Jumlah anggota dari Dewan Konstitusi sendiri berjumlah 9 (RI, 2015).

Di atas adalah gambaran bagan bagaimana Pemilihan Umum terjadi di Prancis sesuai dengan penjelasan yang telah di jelaskan penulis sebelumnya.

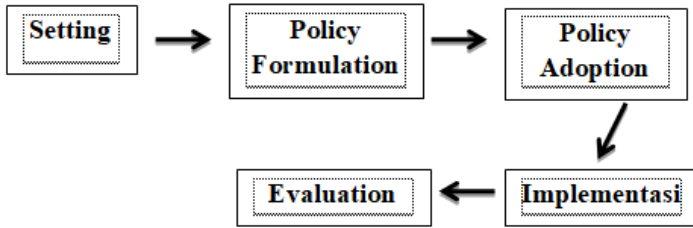
Setelah pemilihan umum terselenggara, maka selanjutnya bagaimana proses suatu kebijakan di buat di Prancis yang akhirnya kebijakan tersebut dapat di jalankan baik dalam negeri atau untuk perpolitikan

Prancis di kancah Internasional. Sebelumnya berikut adalah bagan bagaimana proses suatu kebijakan di Prancis bisa terlaksana.



Gambar 2.3: Proses Pembuatan Kebijakan di Perancis

Dari bagan tersebut usulan atau inisiatif suatu kebijakan bisa muncul dari berbagai macam dewan negara. Bisa saja usulan suatu kebijakan muncul dari dewan negara pemerintahan setempat, senat, *National Assembly*, ataupun dari Presiden. Dari pengamatan seorang ilmuwan politik sosial yaitu Christoph Knill and Jale Tosun dalam bukunya menjelaskan bahwa proses pembuatan suatu kebijakan di Prancis berawal dari sebagai mana bagan di bawah, dan penjelasannya sebagai berikut:



Bagan 2.1: Proses Pengambilan Kebijakan

1. Setting

Dalam Proses *Setting* ini adalah proses adanya observasi untuk melihat dan mengamati apakah dalam lingkungan domestik atau internasional yang di hadapi negara Prancis adanya suatu permasalahan yang memang seharusnya di buat suatu kebijakan. Bagaimana suatu kebijakan bisa di anggap sebagai permasalahan yang sangat adalah bagaimana permasalahan tersebut menjadi suatu permasalahan yang mempengaruhi masyarakat atapun kepentingan Prancis. Biasanya permasalahan ini juga di angkat oleh kelompok-kelompok kepentingan di mana di ajukan dalam kelompok pemerintah untuk mengangkat isu tersebut menjadi sebuah usulan kebijakan. Semua permasalahan yang di usulkan tersebut bisa saja berasal dari badan legislatif, eksekutif, dan badan-badan otonomi daerah.

2. *Policy Formulation*

Sebenarnya dalam proses Perumusan Permasalahan ini aktor dalam badan pemerintah yang paling aktif biasanya adalah badan Legislatif. Dalam proses ini isu/ permasalahan yang telah muncul pada proses Setting akan masuk dalam pembahasan pembuat kebijakan yaitu adalah badan legislatif. Dalam proses ini biasanya badan legislative yang mana lain adalah *National Assembly* dan Senat akan mulai mencari jalan terbaik bagaiman cara terbaik untuk menangani permasalahan ini. Sebenarnya pada

kenyataannya dalam perumusan kebijakan Prancis walaupun badan legislatif telah di jelaskan sebagai badan pemerintah yang merumuskan dan mengkaji kebijakan atau aturan apa yang akan di keluarkan akan tetapi sebenarnya kekuatan keputusan lebih banyak di pegang oleh badan eksekutif yaitu seorang Presiden (Powell, Dalton, & Strom, 2012)

3. Policy Adoption

Pada proses ini kebijakan yang telah di sepakati oleh badan legislative dengan mempertimbang segala aspek akhirnya akan di sahkan. Biasanya dalam proses ini kebijakan akan di perkenalkan terlebih dahulu kepada badan eksekutif, yudikatif, dan pemerintah-pemerintah daerah.

4. Implementasi

Pada proses ini biasanya yang di lakukan adalah mulai mengimplementasikan kebijakan tersebut. Baik kebijakan tersebut di tunjukan oleh permasalahan internal ataupun eksternal Prancis sendiri. Dalam pemerintah Prancis apabila suatu kebijakan telah mulai di implementasikan, tetapi pemerintah masih melakukan pengawasan serta control terhadap kebijakan tersebut agar bisa di sepakati oleh masyarakatnya.

5. Evaluasi

Dalam proses evaluasi ini pemerintah akan melakukan kajian apakah kebijakan yang di keluarkan pas serta sejalan dengan penyelesaian masalah. Apabila permasalahan masih tetap saja muncul maka pemerintah akan melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut sehingga menyebabkan kebijakan tersebut pas serta selaras untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kebijakan yang di rasa kurang pas atau rasional oleh kalangan masyarakat yang hingga saat ini masih di jalankan oleh pemerintah Prancis.

B. Politik Luar Negeri Prancis

Sama dengan Indonesia yang memiliki dasar dalam melakukan hubungan internasional, Prancis juga memiliki dasar dalam melakukan hubungan internasional nya. Dasar hubungan internasional Prancis tersebut adalah *Politique Independence*¹, yang artinya Prancis berhak untuk menjalin hubungan dengan negara manapun dan tetap menjunjung tinggi nilai perdamaian serta aktif dalam upaya perdamaian dunia.

Pada saat itu Prancis menjadi salah satu negara yang berperan dalam penyelesaian perang dunia ke-2 yang bersekutu dengan pihak sekutu pada masa itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, beserta negara lain nya. Sejak selesai nya perang dunia ke-2 terbentuk lah Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana pada masa itu Prancis menjadi salah satu pelopor terbangun nya PBB dan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB hingga sekarang.

Beriring dengan berjalan nya waktu Prancis banya mengikuti organisasi Internasional yang berbasis pemerintahan. Salah satunya adalah Uni Eropa, Francophonie, Uni Latin, dan tentu saja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari aktifnya Prancis semenjak berakhirnya Perang Dunia ke-2 hingga sekarang menunjukkan Prancis memiliki ambisi yang cukup kuat untuk tetap aktif dan di segani di kancah Internasional. Dalam Uni Eropa sendiri Prancis di pandang sebagai salah satu negara dengan kekuatan terkuat dalam bidang ekonomi dan militer nya. Dalam Uni Eropa sendiri Prancis memiliki hak veto berjumlah 29 suara.

¹ Informasi ini didapatkan dalam Website Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Setelah membahas sedikit mengenai keaktifan Prancis di kancah Internasional. Mekanisme politik luar negeri Prancis juga memiliki ciri khasnya sendiri dengan negara lain. Sebenarnya tujuan dari politik luar negeri sendiri dilakukan oleh sebuah negara untuk mempertahankan, mewujudkan, mengamankan kepentingan nasional dari negara-nya masing-masing dalam kancah Internasional. Hal ini dilakukan tentunya oleh setiap negara di mana strategis yang dilakukan oleh setiap negara pasti akan berbeda satu sama lainnya. Hubungan yang dilakukan sebuah negara dengan negara lain hal tersebut bisa menjadi sebuah cara untuk mencapai tujuan dari politik luar negeri itu sendiri. Salah satunya yang dilakukan oleh Prancis adalah Prancis selalu melakukan hubungan internasional baik secara bilateral ataupun internasional. Salah satu contohnya adalah Prancis memiliki hubungan internasional yang baik dengan negara Indonesia semenjak tahun 1950 di mana Indonesia mulai memiliki Kedutaan di Paris, Prancis. Sedangkan salah satu contoh hubungan internasional yang aktif dijalankan oleh Prancis secara multilateral adalah dengan keaktifannya Prancis dalam Uni Eropa dan NATO (French).

Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme negara Prancis melakukan hubungan Politin Internasionalnya, penulis akan menjelaskan gaya politik Internasional Prancis pada saat di bawah kepemimpinan Presiden Nicholas Sarkozy dan tentu saja pada masa Presiden Francois Hollande. Pada masa di bawah kepemimpinan Nicholas Sarkozy pada masa itu pengambilan suatu kebijakan dipengaruhi besar oleh pengaruh *Leadership* atau siapa yang menjadi pemimpin pada masanya. Walaupun yang kita ketahui bahwa dasarnya suatu pengambilan kebijakan harus berkiblat kepada isu atau permasalahan yang di

anggap darurat di kalangan masyarakat. Masa jabatan Nicholas Sarkozy sebagai seorang Presiden di mulai pada 16 Mei 2007. Pada masa kepemimpinan Nicholas Sarkozy sendiri isu-isu yang harus di hadapi oleh dirinya banyak berhubungan dengan masalah keamanan nasional, pengungsi, serta keseimbangan dalam ekonomi-politik di kancah internasional khususnya dalam Organisasi Uni Eropa (Luluhima, 2015).

Pada masa kepemimpinan Nicholas Sarkozy penulis mengamati bahwa kebanyakan kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh Nicholas Sarkozy adalah kebijakan keamanan ke eksistensian Prancis baik Internal sendiri ataupun di kancah internasional. Beberapa kebijakan yang berhubungan tentang keamanan yang di laksanakan oleh Nicholas Sarkozy adalah bekerjasama dengan Uni Eropa mengenai permasalahan dengan negara Libya sehingga terwujudnya perjanjian Lisbon, pengundangan Gaddafi untuk membahas mengenai rencana pembuatan *Mediterranean Union*, serta perbaikan hubungan dengan negara Jerman karena adanya perbedaan pendapat dengan Angela Markle, serta membahas posisi militer Prancis dengan Amerika tentang ke fleksibelan posisi keamanan Prancis. Tidak hanya berfokus kerjasama di lingkungan bilateral akan tetapi Prancis di bawah kepemimpinan Nicholas Sarkozy juga aktif melakukan hubungan internasional dengan organisasi-organisasi internasional, salah satunya adalah Prancis meluncurka *Joint Declaration on Strategic Partnership* di mana kebijakan tersebut berhubungan dengan G-20, serta melakukan kerjasama ekonomi dengan 18 negara di Asia-Afrika, serta 8 negara di kawasan Amerika Latin (Luluhima, 2015). Di sisi lain pada masa kepemimpinan Nicholas Sarkozy juga Prancis mengusulkan untuk "*Union of the Mediterranean*" di mana tujuan dari UTM ini

adalah berkumpulnya negara-negara kawasan Mediterania untuk membuat organisasi untuk bekerjasama dalam berbagai bidang khususnya ekonomi yang bersangkutan dengan SDA Gas dan Minyak Bumi. Akan tetapi pada masa itu usulan Nicholas Sarkozy di tolak mentah-mentah oleh berbagai pihak yang menganggap bahwa usulan tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan ada juga negara yang menganggap bahwa usulan tersebut belum bisa di terima karena masih banyak isu-isu seperti isu militer keamanan yang lebih riskan untuk di bicarakan. Tetapi di sisi lain dalam masa kepemimpinan Nicholas Sarkozy pun Prancis berperan penting dalam konflik antara Israel-Palestina di mana Prancis berperan sebagai Mediator. Akan tetapi dari peranan sebagai seorang mediator Prancis juga banyak melakukan tekanan-tekanan pada kaum Yahudi ataupun Israel yang di anggap melakukan kesalahan. Bahkan Nicholas Sarkozy mengutarakan pendapatnya saat kunjungan ke Yerusalem dan mengatakan bahwa tindakan-tindakan Israel seharusnya di lakukan untuk kepentingan perdamaian dunia bukan hanya kepentingan nasional nya sendiri.

Berbeda dengan masa Nicholas Sarkozy, Francois Hollande sebagai presiden terpilih setelah Nicholas Sarkozy menghadapi dan melakukan manuver politik Internasional yang berbeda. Pada masa jabatan Presiden Francois Hollande sekitar tahun 2012-2016 banyak isu pergolakan yang terjadi sehingga menyebabkan Prancis terbilang sangat aktif di kancah Internasional. Walaupun pada masa itu Presiden Francois Hollande di pandang menjadi salah satu Presiden yang kurang populer daripada presiden lainnya. Strategi mediasi, Eropanisasi masih di lakukan oleh Presiden Francois Hollande itu.

Pada masa kepemimpinan Francois Hollande banyak permasalahan yang sebenarnya di selesaikan

yang pada masa jabatan Nicholas Sarkozy belum terselesaikan. Di sisi lain terselesaikan nya berbagai macam masalah, akan tetapi masalah-masalah muncul baru dan terbilang cukup berat pada masa itu. Salah satunya isu kestabilan keanggotaan Uni Eropa di mana muncul kembali isu keinginan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, serta negara-negara sekutu Prancis di Afrika yang notabennya adalah negara-negara bekas kolonialis Prancis yang mengalami ketidak stabilan dalam pemerintahannya.

Francois Hollande berusaha untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya pada masa itu tanpa adanya keterhubungan hegemoni dengan negara-negara sekutu seperti Amerika, Inggris, Jerman, dsb. Walaupun Prancis mulai menjalankan kepentingan nasionalnya dengan mengesampingkan keterhubungannya dengan negara-negara sekutu, pada masa Francois Hollande negara Prancis mulai menjalin hubungan baik dengan negara-negara seperti Iran, Libanon, Qatar, serta Suriah. Pada masa Francois Hollande juga sebenarnya kekuatan militer Prancis mengenai kekuatan Nuklirnya tidak terlalu di bahas, akan tetapi ada kekhawatiran dari koalisi Prancis yaitu NATO cukup khawatir karena partai yang mengusung Francois Hollande adalah partai sayap kiri yang membuat adanya kekhawatiran bahwa kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh Francois Hollande lebih condong pada ideologi-ideologi sayap kiri. Akan tetapi pada Francois Hollande ada nya persiapan isu penarikan tentara-tentara di Afganistan. Saat kepemimpinan Francois Hollande sendiri banya kebijakan atau keputusan yang di ambil Prancis di duga karena keberpengaruhannya partai di mana Francois Hollande berasal. Salah satunya promosinya tentang hak-hak asasi manusia serta kebijakan tentang kebudayaan yang terus di tekankan. Di sisi politik luar negeri Prancis pada masa Francois Hollande banyak

kerkibat pada hubungan Multilateral regional yang banyak mengeluarkan kebijakan untuk negara-negara di benua Afrika dan Timur Tengah. Salah satunya adalah *Middle East and North Africa* (MENA) sebagai wujud dari aspek Geopolitik di Timur-Tengah dan Afrika Utara yang berlandaskan mengejar kepentingan utama Prancis. Kepentingan utama Prancis pada masa Francois Hollande sendiri adalah keamanan energi, ekspor senjata, dan stabilitas regional.

C. Hubungan Prancis dan Mali

Pada dasarnya hubungan Mali dan Prancis memang sudah terjalin sejak lama. Pada masa kolonialisasi yang di lakukan oleh Prancis sebenarnya Mali adalah salah satu negara yang menjadi negara koloni dari Prancis. Kolonialisasi yang di lakukan oleh Prancis kepada Mali terbilang cukup lama, dari tahun sekitar 1800-san hingga 1960-an Prancis masih melakukan kolonialisasi terhadap Mali. Hingga akhirnya Mali di berikan kemerdekaan oleh Prancis pada tahun 1960 bulan Juni tanggal 20. Kolonialisasi yang di lakukan oleh Prancis terbilang cukup lama yang akhirnya banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan negara Mali hingga sekarang. Salah satunya adalah di mana bahasa nasional dari Mali sendiri adalah bahasa Prancis. Hal tersebut menyebabkan Mali dan Prancis tergabung dalam organisasi Francophonie, organisasi tersebut adalah organisasi bagi negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa nasionalnya.

Setelah terlepasnya Mali dan di berikan kemerdekaan oleh Prancis sebenarnya hubungan Prancis dan Mali masih terjalin sangat erat hingga sekarang. Salah satunya yang paling penting adanya kantor kedutaan besar Prancis di Mali sejak tahun 1961 di mana duta besar pertama Prancis yang di

terima di Mali adalah Fernand Wibaux (Mali, Cooperation decentralisee, 2018). Dengan adanya kantor kedutaan besar Prancis di Mali hal itu bisa menjadi sebuah bukti bahwa semenjak Prancis tidak menjadikan Mali sebuah negara kolonialisme semenjak tahun 1960, Prancis sudah mengakui Mali menjadi sebuah negara secara de facto and de jure. Serta sebaliknya Mali juga memiliki kedutaan besar Mali di Prancis lebih tepatnya di kota Paris.

Kerjasama yang di jalin oleh Mali dan Prancis terbilang cukup lancar sejak merdekanya Mali hingga sekarang. Kerjasama yang di lakukan mulai dalam bidang pendidikan, kebudayaan, militer, serta bantuan kemanusiaan. Dalam dunia pendidikan dan kebudayaan pun Prancis melakukan hubungan yang baik dengan Mali. Diketahui karena Mali adalah salah satu negara dunia ke-tiga yang secara status negara masih negara Berkembang dan salah satu negara miskin di dunia (Martin). Prancis memberikan banyak program beasiswa salah satunya adalah *Le dispositif* di mana program ini adalah beasiswa ini di peruntukan bagi mahasiswa-mahasiswa Mali yang setelah semester lima di berikan kesempatan untuk melanjutkan masa pembelajaran ke Prancis, tujuan dari program ini adalah di harapkan mahasiswa yang telah menyelesaikan stuy di Prancis dapat kembali ke Mali serta menjadi pekemukan pemikir demi kemajuan Mali. Beasiswa ini sudah di lakukan sejak tahun 2000-an di mana target-target jurusan yang di harapkan adalah mahasiswa ekonomi dan kesehatan.

Bukan hanya bekerjasama dengan pihak pemerintahan saja, akan tetapi pemerintah Prancis juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang berada di Mali. Kerjasama ini sudah terjalin sejak tahun 1961-an. Pada awalnya hanya beberapa komunitas yang bekerjasama dengan pemerintah Prancis hingga berkembang pada awal tahun 2000-an

sekitar 80 komunitas. Dari dukungan yang di berikan tidak hanya berfokus pada satu tema komunitas saja akan tetapi bervariasi seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan yang di khususkan pada agrobiologi, energi, dan khususnya permasalahan tentang kekeringan. Bantuan-bantuan yang di berikan oleh Prancis pada Mali ini memang sudah menjadi program kerja yang disusun oleh pemerintah Prancis dengan sebutan *Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères* (MEAE). Pengawasan untuk program tersebut di lakukan oleh Kedutaan Besar Prancis di Mali tentunya. Dalam bidang non pemerintah Prancis memberikan dukungan yang signifikan dengan memerikan dana bantuan dalam program Dana PISCCA (Proyek Inovatif Masyarakat Sipil dan Koalisi Aktor) dimana program ini baru di mulai pada tahun 2018. Program ini terkhusus untuk remaja, anak-anak, dan ibu-ibu yang memiliki permasalahan dalam anak jalanan, ibu remaja, pembantu rumah tangga (Mali, Cooperation decentralisee, 2018).

Dalam segi kebudayaan Prancis juga mendukung tentang eksistensi kebudayaan Mali dengan mengadakan program *L'Institut français du Mali* IFM (Mali, Culture, 2018). Pada tahun sekitar 2017 sampai 2018 program-program kebudayaan yang diselenggarakan oleh Prancis di Mali lebih berfokus pada dunia perfilman yang biasanya di selenggarakan di tepi sungai di Kota Bamako.

Dari berbagai bantuan pendidikan dan kebudayaan Prancis juga membantu pembangunan di Mali karena Mali menjadi salah satu sasaran utama bantuan dari Prancis. Bantuan bagi negara-negara berkembang dari Prancis sering di sebut dengan *L'Agence Française de Développement* (AFD). AFD ini sendiri berfokus untuk membantu empat pilar dalam negara-negara yang akan di bantuinya. Empat pilar tersebut adalah infrakstruktur, Sumber Daya

Manusia, pembangunan desa-desa tertinggal, serta sektor swasta. Walaupun empat pilar tersebut menjadi fokus utama akan tetapi AFD juga fokus pada permasalahan yang menyebabkan empat pilar permasalahan tersebut bisa terjadi. Di Mali sendiri permasalahan yang paling rentan sejak kemerdekaan Mali adalah kekeringan sehingga AFD juga fokus untuk membenahi dan menyalurkan air-air bersih ke pedesaan-pedesaan yang memang sulit mendapatkan air. Total bantuan yang di berikan Prancis kepada Mali setiap tahun nya hingga sekarang sudah mencapai 37 juta Euro (Mali, L'Agence Francaise de Developpement, 2018). Setelahnya lepasnya Mali dari Prancis kerjasama yang dilakukan dalam bidang militer masih terbilang erat. Pertama dimungkinkan karena Prancis adalah negara Maju dan Mali adalah negara Berkembang sehingga menyebabkan Mali memerlukan bantuan dari beberapa aspek salah satunya adalah militer. Aksi pertama yang di lakukan oleh Prancis untuk Mali adalah dengan mengadakan bagi para perwira yang bertugas, dan perwira yang edang tidak bertugas hal ini dilakukan untuk tujuan menjadikan para perwira tersebut menjadi staf profesional yang bisa di tempatkan di beberapa daerah ataupun luar negeri. Pelatihan ini di lakukan di enam belas sekolah yang disebut yaitu ENVR (Mali, Cooperation decentralisee, 2018). Disisi lain Prancis sejak tahun 2011 telah menempatkan salah satu pasukan militernya di Mali lebih tepatnya berdekatan dengan Kedutaan Prancis di Mali dengan sebutan Pasukan *Détachement de Coordination Militaire* (DCM) (Mali L. F., 2013).

Dalam dunia pendidikan dan kebudayaan pun Prancis melakukan hubungan yang baik dengan Mali. Diketahui karena Mali adalah salah satu negara dunia ke-tiga yang secara status negara masih negara Berkembang dan salah satu negara miskin di dunia.

Prancis memberikan banyak program beasiswa salah satunya adalah *Le dispositif* di mana program ini adalah beasiswa ini di peruntukan bagi mahasiswa-mahasiswa Mali yang setelah semester lima di berikan kesempatan untuk melanjutkan masa pembelajaran ke Prancis, tujuan dari program ini adalah di harapkan mahasiswa yang telah menyelesaikan stuy di Prancis dapat kembali ke Mali serta menjadi pekemuan pemikir demi kemajuan Mali. Beasiswa ini sudah di lakukan sejak tahun 2000-an di mana target-target jurusan yang di harapkan adalah mahasiswa ekonomi dan kesehatan.